

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia merupakan alat demokrasi ekonomi dan alat pembangunan masyarakat, yang dilandasi Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Kedudukan koperasi di Indonesia dalam kancah perekonomian nasional mendapat tempat yang paling penting yaitu menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional (Undang – Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1). Dengan demikian, peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang mempunyai ciri – ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Perkoperasian di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlandaskan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Jadi koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemberian kredit merupakan kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, dimana perkreditan memiliki aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional koperasi yang lain.

Walaupun usaha perkreditan merupakan sumber utama penghasilan koperasi simpan pinjam, namun resiko kerugian sebagian besar bersumber pada usaha tersebut, maka usaha ini membutuhkan cara tersendiri dalam pengelolaannya agar koperasi dapat mencapai tujuan pelepasan kredit secara menguntungkan dan aman. Seperti yang ditulis Veithzal dan Andria (6; 2006) bahwa terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit yaitu keuntungan (*profitability*) dan keamanan (*safety*). Pihak dari uang koperasi yang dipinjamkan diharapkan diperoleh hasil berupa keuntungan dari pemungutan bunga, di lain pihak kredit yang diberikan harus terjamin keamanannya. Kondisi aman yang dimaksudkan adalah pengembalian hutang pokok dan bunga kredit dapat dilakukan sesuai dengan jumlah dan jadwal waktu yang telah disepakati bersama antara koperasi dengan anggota peminjam kredit, karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga dapat diasumsikan semakin besar jumlah kredit yang dikeluarkan maka semakin besar pula kemungkinan koperasi untuk memperoleh pendapatan bunga.

Setiap pelepasan fasilitas kredit terkandung unsur risiko. Risiko pemberi kredit adalah risiko gagal membayar kembali kredit baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan membayar (kredit konsumsi) atau debitur memang tidak bersedia membayar. Maka untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin dapat terjadi bagi suatu bank dalam pemberian kredit diperlukan suatu prosedur tertentu seperti yang ditulis Suhardjono (261; 2003) bahwa prosedur kredit merupakan barisan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas. Maka untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin dapat terjadi bagi suatu koperasi dalam pemberian kredit diperlukan suatu prosedur tertentu. Prosedur kredit merupakan kejelasan dalam penyajian atau penyusunan karena apabila tidak jelas maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas.

Proses pengajuan kredit dari proses awal sejak anggota maupun calon anggota yang mengajukan permohonan kredit tersebut maka koperasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab moril atas proses perkreditan tersebut, terlepas dari apakah kredit dapat disetujui atau tidak, bank dengan seluruh karyawannya wajib melakukan pemrosesan secara objektif akan tujuan penggunaan kredit (Ruddy Tri Santoso, 13; 1996). Informasi dan data anggota maupun calon anggota yang melakukan pinjaman kredit diperlukan harus lengkap dan dapat dipercaya. Mendekati hal tersebut dapat ditempuh dengan melakukan penelitian secara fisik (*on the spot*) dan melakukan wawancara dengan anggota maupun calon anggota. Koperasi dapat mengabulkan permohonan kredit anggota maupun calon anggota apabila persyaratan yang ditetapkan koperasi dapat terpenuhi. Pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat dan tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dapat menyebabkan adanya kredit yang bermasalah, karena dalam kredit terdapat unsur waktu, dan waktu dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Semakin banyak kredit yang diberikan dan semakin lama kredit diberikan, akan semakin besar risiko yang terkandung di dalamnya.

Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, maupun koperasi lain yang dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk KSP saat ini sangat cepat dan dinamis hal itu ditandai dengan semakin banyaknya jumlah KSP yang menjadikan persaingan antar KSP di Indonesia semakin ketat, hanya KSP yang mampu memberikan nilai lebih dibanding pesaing yang akan memenangkan persaingan. Usaha meningkatkan pelayanan dan kepuasan anggota merupakan hal sangat penting

diperhatikan oleh KSP. Pelayanan dan kepuasan anggota dapat terwujud jika KSP dapat memenuhi keinginan anggota yang berupa kualitas pelayanan yang baik, kepercayaan dan citra koperasi dimasyarakat.

Salah satu koperasi yang juga merasakan ketatnya persaingan saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari yang berada di kabupaten Pati atau biasa dikenal dengan sebutan KSP Mitra Lestari Pati. Persaingan yang semakin ketattersebut ditandai dengan makin banyaknya KSP yang bermunculan di kabupaten Pati. Pelayanan dan jasa simpan pinjam yang ditawarkan beraneka macam, dengan begitu akan menjadi ciri dan keunggulan tersendiri bagi setiap KSP. Hal tersebut menuntut pihak KSP Mitra Lestari Pati untuk menciptakan strategi agar mampu bersaing dan unggul dibanding KSP lain sebagai kompetitornya.

KSP Mitra Lestari Pati menetapkan tarif jasa yang terjangkau bagi setiap anggota, calon anggota dan masyarakat umum yang melakukan pinjaman atau pengkreditan. Dengan dibagi menjadi dua produk jasa yaitu Mingguan, dan Bulanan. KSP Mitra Lestari Pati yang dinaungi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati memiliki jumlah volume pinjaman kredit yang diberikan kepada anggota, maupun calon anggota tinggi pada setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Volume pinjaman kredit yang diberikan kepada anggota
KSP Mitra Lestari Pati

	2015	2016
Pinjaman Bulanan	Rp 1.668.732.000	Rp 1.598.732.000
Pinjaman Mingguan	Rp 497.672.000	Rp 550.672.000
Jumlah	Rp. 2.166.404.000	Rp. 2.149.404.000

Sumber : Laporan Keuangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam tutup tahun buku 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa, adanya peningkatan jumlah volume pinjaman antar tahun 2014 dan 2015. Di dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, KSP Mitra Lestari Pati menyalurkan pinjaman kredit dan paugun dan agun kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal usaha, beberapa di antaranya mereka berprofesi sebagai pedagang kaki lima, warung makan, toko, industri rumahan, wiraswasta, petani, pekebun dan nelayan. Jika ada anggota yang tidak kuat membayar maka pinjaman diturunkan dan sebaiknya jika lancar dalam membayar sesuai dengan ketentuan maka pinjaman kredit bisa ditambah. Pinjaman kredit diberikan secara bertahap sedikit demi sedikit. Tidak semua anggota yang dilayaninya banyak kredit sama karena disesuaikan dengan usaha yang dimiliki anggota dan kemampuan untuk membayar. Kondisi tersebut menjadikan KSP Mitra Lestari Pati untuk selalu mengembangkan usahanya di bidang pinjaman kredit. Maka pihak KSP Mitra Lestari Pati dituntut untuk mengatur strategi yang telah dijalankan dan berinovasi untuk memodifikasinya agar lebih baik. Hal ini berarti anggota maupun calon anggota telah menaruh perhatian dan kepercayaan pada KSP Mitra Lestari Pati untuk memberikan kredit pinjaman. Dengan demikian, KSP ini harus senantiasa menjaga keberlangsungan hidupnya.

Kelangsungan hidup dan perkembangan serta kesuksesan operasional suatu koperasi salah satunya ditentukan oleh kebijaksanaan yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Melalui kebijaksanaan perkreditan, maka kredit diberikan melalui prosedur. Fungsi prosedur adalah sebagai peraturan yang apabila ditaati akan memberikan hasil yang baik. Apabila koperasi mengabaikan permohonan kredit melalui prosedur yang sehat, resiko berkembangnya kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil. Dengan terselenggaranya prosedur pemberian kredit yang sehat dalam berkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari prosedur persetujuan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati melalui suatu karya ilmiah Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PERSETUJUAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MITRA LESTARI PATI”**

1.2. RuangLingkupPenulisan

Ruanglingkuppenulisanmerupakanpembatasan topic permasalahandengancaramerumuskanbeberapabagianpentingdaripembahasanyang terkandungdalamisilaporanpenyusunanTugasAkhir. Ruang lingkup yang akan dibahasadalahsebagaiberikut :

- a. Prosedur persetujuan pemberian kredit
- b. Risiko kegagalan yang terjadi dari persetujuan pemberian kredit
- c. Pengertian Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam
- d. Prosedurumumpersetujuan pemberiankredit
- e. Prosedur persetujuan pemberian kredit kepada anggota pada KSP Mitra Lestari Pati
- f. Perbandingan tinjauan teori dan tinjauan praktik prosedur pemberian kredit pada KSP Mitra Lestari Pati

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur persetujuan pemberian kredit yang diberikan kepada anggota pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan prosedur persetujuan pemberian kredit yang diberikan kepada anggota pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.

1.3.2. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan referensi dan memperluas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan persetujuan kredit pada koperasi. Selain itu, penulisan ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk referensi tentang permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu pihak manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Lestari Pati dalam mengetahui prosedur persetujuan kredit yang diberikan kepada anggota.
- b. Membantu manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Lestari Pati dalam mengembangkan strategi pemasaran berkaitan dengan peningkatan persetujuan kredit yang diberikan kepada anggota.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder.

(a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 Lukman Ali). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari jawaban pertanyaan atas observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan para pengurus, staff, karyawan Petugas Dinas Lapangan (PDL) maupun karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra (KSP) Lestari Pati.

(b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil dari pihak lain. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan membaca literatur atau bacaan yang berhubungan dengan penulisan laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati yang terdiri dari data-data :

- Sejarah dan gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.
- Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.
- Visi, misi, dan tujuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

(a) Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian (Gorys Keraf, 2001 : 162). Metode ini dilakukan dengan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktik secara langsung selama tiga bulan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.

(b) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada seseorang informan atau seorang otoritas (Gorys Keraf, 2001 : 161). Pada penyusunan Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan dengan para

pengurus, staff, Petugas Dinas Lapangan (PDL), karyawan, serta anggota di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.

(c) Metode Studi Kepustakawan

Metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan akuntansi sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan pustaka tersebut berupa buku-buku, literature, dan dokumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Lestari Pati, serta peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

(d) Media Internet

Media Internet adalah suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan membuka situs internet yang ada hubungannya dengan penulisan sebagai penunjang kelengkapan data penyusunan Tugas Akhir.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tugas Akhir ini mengungkapkan bab-bab dan subbab secara urut dan ringkas tentang permasalahan yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Padababiniberisitentanglatarbelakangmasalahyang mengungkapkanalasanpemilihanjudul,persoalan yang dihadapi yang ditulisataudiuraikandari yang umummenujukehal yang lebihkhusus. Ruanglingkuppenulisanmerupakanabstarksipemilihantopik, pembatasan topic permasalahan yang terkandungdalamisiTugasAkhir.Tujuanmanfaat yang dihasilkandalampenyusunanTugasAkhirini. Data penelitiandancaramengumpulkan data yang dipakai, sertasisematikapenulisandalampenyusunanTugasAkhirini.

BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MITRA LESTARI PATI

PadababiniberisitentangSejarahberdirinya, perijinandanlegalitas, visidanmisi, tujuandan motto, strukturorganisasi, job description, keanggotaanKoperasiSimpanPinjam (KSP) Mitra Lestari Pati.

BAB III : PEMBAHASAN

Padabagianinidiuraikantentangtinjauanteori ,tinjauanpraktik yang membandingkankegiatanpelaksanaanKuliahKerjaPraktikdenganteori selama di perkuliahan.

BAB IV : PENUTUP

Padabagianpentupberisitentang, rangkuman yang telahditulisdalampembahasandankesimpulan yang terkaitdengantopik yang ditulis, serta saran yang diberikanpenulis.